

**MOTIVASI INDONESIA MEMPERPANJANG INDONESIA – JAPAN  
ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT (IJEPA)**

**Oleh:**

**Fajriah Sitti Khadijah Syam**

**([fajesvam@gmail.com](mailto:fajesvam@gmail.com))**

**Dosen Pembimbing: Dr. Tri Joko Waluyo, M.Si**

**Bibliografi: 17 Buku, 11 Jurnal, 16 Dokumen Resmi, 13 Situs**

Jurusan Hubungan Internasional  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. HR. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru  
28294  
Telp/Fax. 0761-63277

***Abstract***

*This study intends to analyze Indonesia's motivation to extend the Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement. Indonesia is involved in a bilateral trade agreement with Japan, known as the Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA). The agreement was officially signed in 2008. IJEPA (Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement) is a free trade agreement or (Free Trade Agreement) within the framework of a bilateral economic cooperation agreement that includes 3 main issues, namely, Liberalization, Facilitation, Cooperation*

*In this study, the authors used library research and qualitative research methods. The analysis in this study uses the level of unit or country analysis, using the theory of international cooperation. The use of this theory is because the research discusses Indonesian cooperation agreements at the international level. The perspective in this study uses the perspective of Liberalism.*

*Indonesia - Japan Economic Partnership Agreement is a bilateral cooperation in the economic sector and is expected to provide benefits to both countries through various schemes implemented. In general, this agreement has a broad scope with the aim of strengthening the economic partnership between the two countries.*

*By seeing the benefits and potential of Indonesia in this agreement, Indonesia decided to continue to extend the IJEPA agreement after negotiating in the General Review with Japan.  
**Keyword(s) : EPA, IJEPA, Motivation, Bilateral Agreement.***

**PENDAHULUAN**

Ekonomi dunia mengalami perubahan cukup signifikan dan kekuatan ekonomi bergeser dengan diwarnai kompleksnya persaingan yang tajam.

Masalah ini dihadapi oleh sebagian besar negara-negara di berbagai kawasan, terutama negara-negara berkembang. Banyak upaya yang dilakukan dalam meningkatkan pembangunan nasional

melalui berbagai kegiatan, khususnya pembangunan ekonomi, perdagangan dan bisnis internasional terasa semakin rumit menjelang era globalisasi yang penuh tantangan.

Situasi perekonomian sedemikian rupa yang mengantarkan pemerintah negara-negara dunia ketiga, seperti Indonesia pada titik yang rentan terhadap tekanan globalisasi karena cepatnya pergerakan modal yang tidak berimbang dengan terbatasnya kualitas ruang gerak tenaga kerja dan sumber daya lainnya.

Menurut Thomas I Friedman<sup>1</sup>, globalisasi mempunyai tiga dimensi yaitu: Pertama, dimensi idea atau ideologi yaitu “Kapitalisme”. Dalam pengertian ini termasuk seperangkat nilai yang menyertainya, yaitu falsafah individualism, demokrasi dan HAM. Kedua, dimensi ekonomi yaitu pasar bebas dengan seperangkat tata nilai yang harus membuka kesempatan terbukanya arus barang dan jasa dari suatu negara ke negara lain. Ketiga, dimensi teknologi khususnya teknologi informasi. Dengan teknologi akan terbuka batas-batas negara sehingga negara makin tanpa batas (*borderless country*). Dengan demikian negara - negara industri maju akan lebih mudah menjual barang dan jasa ke negara berkembang. Selama ini setiap negara percaya bahwa tidak ada satu negara yang bisa terhindar atau tidak terkena proses globalisasi. Dengan demikian penerapan perdagangan dan investasi bebas adalah

pilihan terbaik yang harus dilakukan setiap negara. Di era globalisasi ini hampir setiap negara melakukan kerja sama internasional dengan negara lain. Kerja sama internasional merupakan hubungan yang dibentuk oleh suatu negara dengan negara lain dengan tujuan memenuhi kebutuhan rakyat dan kepentingan-kepentingan negara.

FTA (*Free Trade Agreement*), perjanjian internasional bagi penghapusan tarif yang dibebankan antara negara atau kawasan dan untuk menghapus peraturan dalam bidang penanaman modal asing pada bidang jasa perdagangan.<sup>2</sup> Suatu perjanjian perdagangan bebas yang dilakukan antara suatu negara dengan negara lainnya menjadi akibat dari liberalisasi perdagangan yang tidak dapat dihindari oleh semua negara sebagai masyarakat internasional. FTA terbentuk dari hasil negosiasi antar negara untuk memenuhi kebutuhan satu sama lain.

Begitu pula dengan kerja sama yang dibangun antara Indonesia dan Jepang dalam tujuan mengembangkan sektor-sektor tertentu. Jepang merupakan mitra dagang terbesar dalam hal ekspor-impor bagi Indonesia.

Sejak lima dekade terakhir, Indonesia dan Jepang telah menjalin hubungan diplomatic yang baik terutama dalam bidang ekonomi. Sejak penandatanganan perjanjian perdamaian pada tanggal 20 Januari 1958 di Jakarta, kedua negara memulai hubungan ekonomi dengan kesepakatan damai yaitu pembayaran

---

<sup>1</sup> R. Hendra Halwani, *Ekonomi Internasional dan Globalisasi Ekonomi* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002) 225.

<sup>2</sup> JETRO, “Bagaimana menikmati preferensi tarif melalui EPA/FTA”

[https://www.jetro.go.jp/ext\\_images/indonesia/jiepa/index.html/BrosurEPAind2009.pdf](https://www.jetro.go.jp/ext_images/indonesia/jiepa/index.html/BrosurEPAind2009.pdf) (diakses pada 20 Desember 2020) 1.

ganti rugi akibat perang. Perjanjian damai memaksa Jepang memberi ganti rugi kepada Indonesia sebesar US\$ 223, 8 juta atau setara dengan ¥ 80, 3 milyar kurs pada saat itu. Selain itu, disyaratkan bahwa Jepang harus menghapus hutang Indonesia sebelumnya yaitu sejumlah US\$ 176, 92 juta, diikuti dengan bantuan ekonomi sebesar US\$ 400 juta.<sup>3</sup>

Hubungan ekonomi dan perdagangan bilateral dengan Jepang didasari oleh *Treaty on Amity Relations and Commerce* yang ditandatangani di Tokyo pada tanggal 1 Juli 1961. Indonesia diwakili oleh Menteri luar Negeri, Dr. H. Soebandrio. Persetujuan lainnya adalah : *Treaty on Air Service* 23 Januari 1962 , *Agreement in Science and Technoogy cooperation* 12 Januari 1981, dan *Agreement on the Avoidance of Doubi Taxation* 3 Maret 1982.<sup>4</sup>

Dengan melihat hubungan baik dan besarnya nilai ekspor-impor kedua negara, Indonesia dan Jepang setuju membuat kerangka kerja sama ekonomi EPA (*Economic Partnership Agreement*) yang akan memudahkan kedua negara untuk melangsungkan kegiatan perdagangan bilateral. EPA digambarkan sebagai kesepakatan dagang yang melampaui batas-batas eliminasi tariff yang dicakup oleh FTA tradisional dengan menjangkau area baru

---

<sup>3</sup> Samsul Hadi, *Strategi Pembangunan Mahathir dan Soeharto : Politik Industrialisasi dan Modal Jepang di Malaysia dan Indonesia* (Jakarta: Pelangi Cendikia dan Japan Foundation, 2005) 181.

<sup>4</sup> Direktorat kerjasama Bilateral I Departemen perdagangan Indonesia. "Buku Agenda Perdagangan Indonesia" 2007, hlm.30

<sup>5</sup> Ministry of Economy, Trade and Industry, "White Paper on International Economy

seperti investasi, kompetisi digitalisasi prosedur dagang, harmonisasi *e-commerce* untuk sistem terkait dan fasilitasi pergerakan orang.<sup>5</sup>

Kerjasama perdagangan bilateral yang disepakati antara Indonesia dan Jepang saat ini tertuang di dalam *Indonesia Japan Economic Partnership Agreement* (IJEPA) yang diimplementasikan sejak 2008. Menurut kedua negara, IJEPA memang diperlukan diantara kedua negara dan hal ini merupakan kebijakan perdagangan bebas bilateral yang diambil Indonesia dalam memenuhi kebutuhan nasional bidang ekonomi khususnya perluasan akses pasar produk ekspor di pasar Jepang.<sup>6</sup>

Indonesia membuka akses pasarnya sekitar 93 % dari 11 akses pasar. 163 *tarif line*-nya bagi produk Jepang, dengan 58% dari *tarif line* tersebut langsung berlaku saat perjanjian dimulai yaitu tanggal 1 Juli 2008, sedangkan Jepang, membuka akses pasarnya bagi produk Indonesia lebih dari 90% dari *tarif line*-nya, dengan 80% *tarif line* tersebut langsung berlaku saat perjanjian dimulai.<sup>7</sup> Indonesia sendiri memandang IJEPA sebagai bentuk dari suatu kerjasama formal dengan Jepang yang

and Trade" <http://www.meti.go.jp/english/report/data/gWT2014fe.html> (diakses pada 20 Desember 2020)

<sup>6</sup> Gayatri T, "Analisa Kepentingan Ekonomi dan Politik Indonesia dan Jepang dalam Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA) Tahun 2007" Fisip Universitas Indonesia, 2008.

<sup>7</sup> Sigit Setiawan, "Analisis Dampak IJEPA Terhadap Indonesia dan Jepang" *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis* 17, no.2 (2012): 1

tujuannya untuk meningkatkan volume perdagangan kedua negara.<sup>8</sup>

IJEPA (*Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement*) merupakan kesepakatan perdagangan bebas atau (*Free Trade Agreement*) dalam bingkai kesepakatan kerjasama ekonomi secara bilateral yang pertama kali dilakukan Indonesia dengan negara mitra. Perjanjian tersebut disusun untuk menghasilkan manfaat bagi kedua pihak secara adil, seimbang, dan terukur melalui liberalisasi akses pasar, fasilitasi, dan kerjasama melalui pengembangan kapasitas untuk sektor-sektor industri prioritas. Terdapat 11 bidang yang tercakup dalam kesepakatan IJEPA antara lain perdagangan barang, pengaturan terkait asal barang, prosedur kepabeanan, perdagangan jasa, investasi, peningkatan kepercayaan bisnis, ketenagakerjaan, energi dan sumber daya mineral, hak kekayaan intelektual, kebijakan persaingan usaha, Kerjasama teknis peningkatan kapasitas, ketentuan umum, dan pengadaan pemerintah

## KERANGKA TEORI

Penulis menggunakan perspektif Liberalisme pada penelitian ini. Liberalisme merupakan sebuah perspektif dalam hubungan internasional yang mngambil pandangan positif terhadap sifat manusia. Liberalisme mengusung kebebasan politik, demokrasi dan hak-hak yang dijamin secara konstitusional

kebebasan individu dan persamaan di depan hukum. Liberalisme mendukung persaingan individu dalam masyarakat sipil dan mengklaim kapitalisme paling baik dalam mendorong kesejahteraan semua individu.<sup>9</sup> Dalam liberalisme, individu memiliki banyak kepentingan dan dengan demikian dapat terlibat aksi sosial yang kolaboratif dan kooperatif, baik domestik maupun internasional yang nantinya menghasilkan manfaat besar bagi setiap orang baik di dalam negeri atau luar negeri. Paham inilah yang kemudian menganggap kegiatan perdagangan muncul karena kebutuhan manusia yang harus dipenuhi melihatsifat alami manusia yang saling bergantung.

Teori yang penulis gunakan ialah teori kerjasama internasional dimana bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bersama. Kerjasama biasanya dilakukan untuk menentang persaingan atau konflik yang melibatkan perilaku aktor dalam mencari tujuan dan berusaha untuk mengambil keuntungan dalam memenuhi kepentingannya. Kerjasama internasional, meliputi kerjasama bidang politik, social, pertahanan, keamanan, ekonomi dan kebudayaan yang tetap berdasarkan pada politik luar negeri negara terlibat.<sup>10</sup>

Mulanya, fokus dari teori hubungan internasional adalah mempelajari tentang penyebab-penyebab dan kondisi-kondisi yang menciptakan kerjasama. Kerjasama terbentuk sebagai

---

<sup>9</sup> Scott Burchill et al., *Theories of International Relations: Third Edition* (New York: Palgrave Macmillan, 2005), 55.

<sup>10</sup> Dougherty & Pfaltzgraff, *Contending Theories of International Relation: A Comprehensive Survey* (4th Edition ed.). (New York: Ed Addison Wesley Longman, 1997) 418.

akibat dari penyesuaian-penyesuaian perilaku aktor-aktor dalam merespon atau mengantisipasi pilihan-pilihan yang di ambil oleh aktor-aktor dalam merespon atau mengantisipasi pilihan-pilihan yang diambil oleh aktor-aktor lainnya. Kerjasama dapat dijalankan dalam suatu proses perundingan yang diadakan secara nyata atau karena masing-masing pihak saling tahu sehingga tidak lagi diperlukan suatu perundingan.<sup>11</sup>

Dalam perjanjian ekonomi Indonesia dan Jepang pasti masing-masing negara memiliki kepentingan nasional yang harus terpenuhi. Karena pada dasarnya kerja sama dilakukan untuk memenuhi kepentingan nasional suatu negara. Konsep mengenai hal ini memang sangat sulit generalisasikan mengenai apa saja yang termasuk dalam kepentingan nasional melihat pemerintah yang berbeda-beda tiap negara yang tentu menghasilkan kepentingan nasional yang berbeda pula, bahkan tidak jarang kepentingan nasional duduk berlawanan antar negara satu dengan negara yang lain.

Dalam perwujudannya, kepentingan nasional timbul akibat terbatasnya Sumber daya nasional suatu negara, baik itu Sumber Daya Manusia (SDM) maupun Sumber Daya Alam (SDA). Negara sebagai organisasi yang mempunyai otoritas harus menjaga dan memperkuat sumber daya agar kepentingan nasionalnya tidak terganggu.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada penelitian ini penulis berfokus pada Manfaat dan Potensi Indonesia dalam kerangka Kerjasama Indonesia – Japan Economic Partnership Agreement

Penulis memaparkan Tinjauan umum Kerjasama Indonesia dan Jepang (IJEPA) sebagai berikut.

### *Indonesia – Jepang Economic Partnership Agreement (IJEPA)*

IJEPA memang diperlukan diantara kedua negara dan hal ini merupakan kebijakan perdagangan bebas bilateral yang diambil Indonesia dalam memenuhi kebutuhan nasional bidang ekonomi khususnya perluasan akses pasar produk ekspor di pasar Jepang.<sup>12</sup>

IJEPA (*Indonesia Japan Economic Partnership Agreement*) ditandatangani di Jakarta pada 20 Agustus 2007 dan berlaku efektif pada 1 Juli 2008. IJEPA memiliki tiga pilar penting yaitu *liberalization, facilitation, cooperation*.<sup>13</sup>

1. *Liberalization* yang dilakukan dengan cara menghapus/mengurangi hambatan perdagangan dan investasi (bea masuk, memberi kepastian hukum). Namun untuk dapat berjalan dengan lancar suatu pasar yang kompetitif perlu dukungan perundang-undangan yang mengatur persaingan yang sehat dan melarang praktek monopoli.
2. *Facilitation* perdagangan merupakan usaha yang dilakukan untuk memperbaiki iklim investasi

---

<sup>11</sup> Ibid

<sup>12</sup> Loc Chit

<sup>13</sup> Loc Chit

dan meningkatkan tingkat kepercayaan bagi investor Jepang. Hal ini dilakukan melalui Kerjasama di bidang prosedur kepabeanan, pelabuhan dan jasa-jasa perdagangan, standarisasi, dan upaya-upaya fasilitasi lain.

3. Sedangkan *Cooperation* adalah Mekanisme kerjasama untuk meningkatkan kapasitas Indonesia sehingga mampu bersaing dan memanfaatkan peluang yang ada. Ketiga pilar inilah yang merupakan dasar bagi pelaksanaan perjanjian ini yang nantinya akan membawa banyak manfaat bagi kedua negara.

Berdasarkan pilar tersebut disepakati 11 elemen yang dibicarakan dalam kerangka perundingan IJEPa, yaitu:<sup>14</sup>

1. *Trade in Goods* (Perdagangan Barang)
2. *Rules of Origin* (Ketentuan Asal Barang)
3. *Customs Procedures* (Prosedur Kepabeanan)
4. *Investment* (Investasi)
5. *Trade in Services* (Perdagangan Jasa)
6. *Move of Natural Persons* (Pindahan Orang Perorangan)
7. *Energy and Mineral Resources* (Energi dan Sumber Daya Mineral)
8. *Intellectual Property Right* (Hak Kekayaan Intelektual)

9. *Government Procurement* (Pengadaan Barang dan Jasa bagi Pemerintah)

10. *Competition Policy* (Aturan Kepercayaan Usaha)

11. *Cooperation* (Kerjasama)

### Dampak Ijepa

Secara sederhana, IJEPa berdampak positif bagi Indonesia karena terdapat keuntungan berupa bea ekspor yang sangat rendah bahkan hampir 0% dan meningkatnya investasi pada kedua negara khususnya Indonesia.

Tabel 1. Neraca Perdagangan Indonesia – Jepang tahun 2014-2018

	2014	2015	2016	2017	2018
Impor	17.01	13.26	12.98	15.24	17.98
Ekspor	23.12	18.02	16.1	17.8	19.47
<b>Neraca Perdagangan</b>	<b>6.11</b>	<b>4.76</b>	<b>3.11</b>	<b>2.56</b>	<b>1.49</b>

Sumber : ITPC

Untuk melihat kinerja perdagangan Indonesia, dapat dilihat pada tabel diatas, meskipun Impor Indonesia cenderung meningkat, namun masih diimbangi oleh tingginya ekspor yang dilakukan Indonesia ke Jepang. Neraca perdagangan menunjukkan surplus setiap tahunnya. Total perdagangan kedua negara pada tahun pada tahun 2018 mencapai USD

<sup>14</sup> MOFA Japan, “*Joint Press Statement Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement*”, <http://www.mofa.go.jp/region/asia->

[paci/indonesia/joint0611-2.html](http://paci/indonesia/joint0611-2.html) diakses pada 4 April 2021

37,4 miliar. Neraca perdagangan Indonesia-Jepang pada tahun 2018 surplus bagi Indonesia sebesar USD 1,49 miliar.

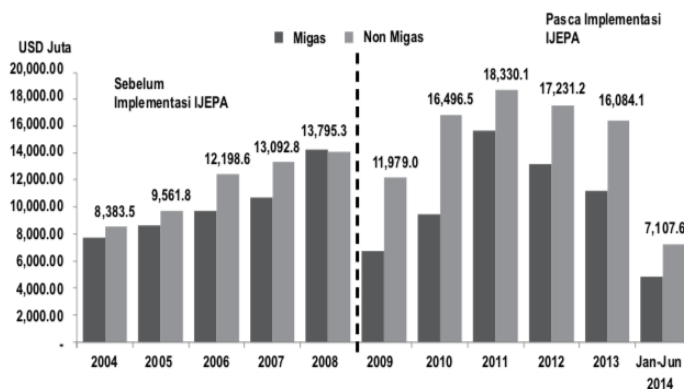
Meski demikian, surplus neraca perdagangan Indonesia menunjukkan penurunan yang konstan setiap tahun sehingga Indonesia merasa perlu untuk segera menyelesaikan perundingan pengkajian perjanjian dengan Jepang agar dapat mengoptimalkan kinerja perdagangan kedepannya.

Peningkatan kinerja perdagangan dengan penghapusan tarif ekspor impor atau pembebasan bea masuk memiliki dampak yang positif bagi Indonesia, dimana nilai perdagangan Indonesia surplus dan sejak pengimplementasian IJEPA. Meskipun tidak selalu mengalami kenaikan, nilai perdagangan In-

investasi dari Jepang berupa didirikannya perusahaan - perusahaan yang berbasis teknologi transportasi Jepang di Indonesia merupakan salah satu keuntungan Indonesia. Tidak hanya dalam ekspor dan impor, implementasi IJEPA juga berdampak pada peningkatan investor Jepang di Indonesia, sejalan dengan misi IJEPA yang salah satunya bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan investor Jepang untuk berinvestasi. Peningkatan investasi Jepang hingga tahun 2017 mencapai USD 4,9 Miliar dengan sektor utama investasi berupa listrik, industri alat angkatan transportasi, mesin dan elektronik.<sup>15</sup>

IJEPA telah meningkatkan kontribusi langsung ekspor terhadap pendapatan nasional Indonesia sebesar US\$ 2,7 miliar per tahun atau 5,23% per tahun atau 1,58 kali lipat dibandingkan tanpa skema IJEPA. Dampak IJEPA berupa kontribusi langsung terhadap pendapatan nasional tersebut ditambah dengan tumbuhnya aktivitas ekonomi di sektor hulu dan hilir dari perdagangan internasional yang turut meningkatkan pendapatan nasional dalam jangka panjang menyebabkan meningkatnya kesejahteraan masyarakat kedua negara.

Berdasarkan data BKPM, Jepang merupakan asal investor terbesar kedua di Indonesia dengan nilai investasi kumulatif mencapai US\$ 22,53 milyar dari tahun 2015-2019. Investor Jepang masih mempercayai Indonesia untuk menanamkan modal dalam sector kelistrikan. Hal ini dibuktikan dengan penanaman modal sebesar US\$600 juta



nesia selalu lebih tinggi dibandingkan Jepang ke Indonesia, keduanya cenderung mengalami kenaikan setelah IJEPA diterapkan.

Grafik 1. Ekspor Indonesia ke Jepang tahun 2004-2014

Sumber: BPS

Selain ketergantungan Indonesia pada skema USDFS, peningkatan

<sup>15</sup> Kementerian Perdagangan. Fact-sheet IJEPA.

dan US\$400juta ke pembangunan pembangkit listrik di Jawa Barat dan Sumatera Utara.<sup>16</sup>

Peningkatan tren investasi meningkat hingga 26,2% sejak IJEPA diberlakukan<sup>17</sup>. Hingga saat ini, total perusahaan Jepang yang berada di Indonesia hampir mencapai angka 1500, terjadi peningkatan lebih dari 45% dibandingkan dengan tahun 2006 sebelum IJEPA diimplementasikan, jumlah perusahaan yang masuk ke Indonesia 783 perusahaan dan mayoritas merupakan perusahaan yang bergerak dibidang teknologi transportasi.

Dalam sektor ketenagakerjaan (*Movement of Natural Person*), IJEPA membantu memberikan peluang kerja bagi tenaga perawat Indonesia yang mengalami surplus sehingga peluang kerja dalam negeri berkurang.

### **Potensi Indonesia**

Dengan terbukanya lapangan pekerjaan, meningkatnya sektor ekspor dan impor, berkembangnya industri nasional serta pertumbuhan ekonomi akan berdampak pada daya beli masyarakat yang meningkat. Peningkatan ini akan membawa dampak positif bagi masyarakat Indonesia terutama yang bersangkutan langsung dengan sektor-sektor dalam cakupan IJEPA.

Peningkatan daya beli masyarakat sendiri berbanding lurus dengan taraf kesejahteraan masyarakat secara ekonomi, itulah mengapa secara tidak langsung pemerintah Indonesia memiliki harapan besar terhadap perjanjian kerja sama ini.

Di sektor investasi, Jepang menyatakan rencana ekspansi investasi perusahaan otomotif seperti Toyota, Mitsubishi, Honda dan Suzuki, Kemudian mendorong relokasi perusahaan Jepang ke Indonesia.

Hingga tahun 2007, Jepang menjadi investor asing terbesar di Indonesia dengan jumlah akumulatif dan Jepang juga merupakan negara asal investasi asing ke-4 di Indonesia sebesar US\$ 40 milyar. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Jepang adalah salah satu partner potensial dan penting yang tidak dapat diabaikan dalam rangka memperluas investasi di Indonesia.<sup>18</sup>

Di sektor perdagangan jasa, Indonesia akan memiliki kesempatan untuk mengeksport jasa bisnis ke Jepang berupa jasa bisnis dan rekreasi budaya dan begitupun sebaliknya dari pihak Jepang. Upaya ini dapat dikategorikan sebagai upaya pertukaran budaya yang diharapkan dapat membawa pengaruh positif kepada kedua negara serta angin

---

<sup>16</sup> Badan Koordinasi Penanaman Modal, "Jepang Masih Minati Listrik, Siapkan Modal US\$600juta"  
[https://www.bkpm.go.id/images/uploads/file\\_siaran\\_pers/Siaran\\_Pers\\_BKPM\\_29\\_0116-Jepang\\_Masih\\_Minati\\_Listrik\\_Siapkan\\_Investasi\\_US\\_600\\_Juta.pdf](https://www.bkpm.go.id/images/uploads/file_siaran_pers/Siaran_Pers_BKPM_29_0116-Jepang_Masih_Minati_Listrik_Siapkan_Investasi_US_600_Juta.pdf) diakses pada 15 Juni 2021

<sup>17</sup> Kementerian Perdagangan. Loc Chit.

<sup>18</sup> David Adam Stott, "The Japan-Indonesia Economic Partnership: Agreement Between Equals?" *The Asia Pacific Journal: Japan Focus* Vol.6 Issue 7 (2008), 3.



segar untuk makin mengeratkan hubungan kerja sama antara Indonesia dan Jepang.

Salah satu sektor jasa potensial yang dibuka oleh Jepang dengan komitmen penuh yaitu jasa arsitek. Walaupun jumlahnya masih sangat kecil, tetapi pengalaman perusahaan seperti Urbane Indonesia yang telah mengekspor jasanya ke luar negeri dapat berpeluang untuk memasuki sektor jasa potensial ini.<sup>19</sup>

Dalam sektor ketenagakerjaan, melalui General Review IJEPA, kedua negara tengah membahas penambahan jabatan kerja baru yakni pada sektor pariwisata (hospitality). Dan ditandatanganinya Memorandum *Cooperation on a Basic Framework for Proper Operation of the System pertaining to Foreign Human Resources with the Status of Residence of "Specified Skilled Worker"* yang bertujuan untuk melindungi pekerja terampil tertentu dengan cara menetapkan kerangka dasar untuk kemitraan informasi dan mekanisme penempatan dan perlindungan bagi pekerja terampil tertentu untuk memastikan penerapan yang tepat dari sistem pengiriman dan penerimaan mereka.<sup>20</sup>

## PENUTUP

---

<sup>19</sup> Muhammad Fawaiq, "Peluang Ekspor Jasa Indonesia Ke Jepang Melalui Mode 3 (Commercial Presence) dan Mode 4 (Movement of Natural Persons) Pada Kerjasama IJEPA", *Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan* Vol.8 No.1

<sup>20</sup> MOFA Japan, "*Signing of Memorandum of Cooperation between Japan and Indo-*

nesia on a Basic Framework for Proper Operation of the System pertaining to Foreign Human Resources with the Status of Residence of "Specified Skilled Worker" [https://www.mofa.go.jp/press/press4e\\_002489.html](https://www.mofa.go.jp/press/press4e_002489.html) diakses pada 15 Juni 2021

Perjanjian ini menjadi salah satu hal penting dalam hubungan bilateral Indonesia terhadap Jepang yang mana Jepang merupakan salah satu mitra kerjasama ekonomi Indonesia baik itu pada sektor perdagangan maupun investasi. Perjanjian ini juga memiliki manfaat bagi kedua negara yaitu saling melengkapi kebutuhan dari sumber daya alam yang tidak ada di Jepang dengan tiga kebutuhan utama Jepang yang berupa bahan bakar mineral, mesin dan peralatan listrik, bijih, kerak, dan abu logam.

Secara sederhana, IJEPA berdampak positif bagi Indonesia karena terdapat keuntungan berupa bea ekspor yang sangat rendah bahkan hampir 0% dan meningkatnya investasi pada kedua negara khususnya Indonesia. Dengan adanya kerja sama dengan Jepang, dapat membuka pintu kesempatan bagi Indonesia untuk menjalin kerja sama dengan negara lain terutama di kawasan ASEAN.

Indonesia memutuskan untuk tetap memperpanjang IJEPA setelah perundingan General Review IJEPA. Indonesia masih sangat membutuhkan fasilitas pembebasan bea masuk, khususnya dalam impor bahan baku. Peningkatan kinerja perdagangan dengan penghapusan tarif ekspor impor atau

pembebasan bea masuk memiliki dampak yang positif bagi Indonesia, dimana nilai perdagangan Indonesia surplus dan sejak pengimplementasian IJEPA.

## DAFTAR PUSTAKA

- Badan Koordinasi Penanaman Modal, “Jepang Masih Minati Listrik, Siapkan Modal US\$600juta” [https://www.bkpm.go.id/images/uploads/file\\_siaran\\_pers/Siaran\\_Pers\\_BKPM\\_290116-Jepang\\_Masih\\_Minati\\_Listrik\\_Siapkan\\_Investasi\\_US\\_600\\_Juta.pdf](https://www.bkpm.go.id/images/uploads/file_siaran_pers/Siaran_Pers_BKPM_290116-Jepang_Masih_Minati_Listrik_Siapkan_Investasi_US_600_Juta.pdf) diakses pada 15 Juni 2021
- David Adam Stott, “The Japan-Indonesia Economic Partnership: Agreement Between Equals?” *The Asia Pacific Journal: Japan Focus* Vol.6 Issue 7 (2008)
- Direktorat kerjasama Bilateral I Departemen perdagangan Indonesia. “Buku Agenda Perdagangan Indonesia” 2007.
- Dougherty & Pfaltzgraff, *Contending Theories of International Relation: A Comprehensive Survey* (4th Edition ed.). (New York: Ed Addison Wesley Longman, 1997)
- Gayatri T, “Analisa Kepentingan Ekonomi dan Politik Indonesia dan Jepang dalam Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA) Tahun 2007” Fisip Universitas Indonesia, 2008.
- JETRO, “Bagaimana menikmati preferensi tarif melalui EPA/FTA” [https://www.jetro.go.jp/ext\\_images/indonesia/jiepa/index.html/BrosurE-PAind2009.pdf](https://www.jetro.go.jp/ext_images/indonesia/jiepa/index.html/BrosurE-PAind2009.pdf) (diakses pada 20 Desember 2020)
- Kementerian Perdagangan. Factsheet IJEPA.
- Kementerian Perdagangan. Loc Chit.
- Ministry of Economy, Trade and Industry, “White Paper on International Economy and Trade” <http://www.meti.go.jp/english/report/data/gWT2014fe.html> (diakses pada 20 Desember 2020)
- MOFA Japan, “*Joint Press Statement Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement*”, <http://www.mofa.go.jp/region/asia-paci/indonesia/joint0611-2.html> diakses pada 4 April 2021
- MOFA Japan, “*Signing of Memorandum of Cooperation between Japan and Indonesia on a Basic Framework for Proper Operation of the System pertaining to Foreign Human Resources with the Status of Residence of “Specified Skilled Worker”*” [https://www.mofa.go.jp/press/press4e\\_002489.html](https://www.mofa.go.jp/press/press4e_002489.html) diakses pada 15 Juni 2021
- Muhammad Fawaiq, “Peluang Ekspor Jasa Indonesia Ke Jepang Melalui Mode 3 (Commercial

- Presence) dan Mode 4 (Movement of Natural Persons) Pada Kerjasama IJEPA”, *Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan* Vol.8 No.1
- R. Hendra Halwani, *Ekonomi Internasional dan Globalisasi Ekonomi* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002)
- Samsul Hadi, *Strategi Pembangunan Mahathir dan Soeharto : Politik Industrialisasi dan Modal Jepang di Malaysia dan Indonesia* (Jakarta: Pelangi Cendikia dan Japan Foundation, 2005)
- Scott Burchill et al., *Theories of International Relations: Third Edition* (New York: Palgrave Macmillan, 2005)
- Sigit Setiawan, “Analisis Dampak IJEPA Terhadap Indonesia dan Jepang” *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis* 17, no.2 (2012)